

Mobilisasi Elektoral dan Otoritas Keagamaan: Analisis Interpersonal Aktor Gereja dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020

Regina Dwi Putri Cahyani^{1*}, Ariana Yunus² and Umami Suci Fathia Bailusy³

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

^{2,3} Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Correspondent Author: reginapatalasi@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: <i>Electoral Mobilization, Religious Authority, Church Actors, Local Elections, Makassar</i>	<i>The involvement of religious actors in local political contestations often sparks debates about the neutrality of religious institutions versus individual political rights. This study aims to analyze the involvement trends and support patterns of church actors in the 2020 Makassar Mayoral Election. Using descriptive qualitative methods, data collection was conducted through in-depth interviews with church administrators (pastors/pastors) and congregations, supplemented by documentation studies. Data analysis was analyzed through the lens of Neo-institutionalism, the concept of political actors, and the theory of religious authority. The results show that institutionally, churches in Makassar City maintain neutrality and do not engage in practical politics. However, at the individual actor level (pastors, ministers, and functionaries), there is room for interpersonal and moral discretion used to foster political unity. This phenomenon materialized through the formation of informal institutions, such as the Makassar City Prayer Network, which persuasively mobilized support for the incumbent candidate through discussion spaces outside the formal church structure. On the other hand, the incumbent candidate utilized an inclusive strategy by engaging with the minority Christian community through facilitating social activities and community programs. These findings confirm that the neutrality of religious institutions is illusory when confronted with the agency of actors with charismatic authority to influence congregational voter preferences. This research contributes to the political sociology literature on the dynamics of political endorsement and the use of informal religious networks in local democracy.</i>

Kata Kunci: <i>Mobilisasi Elektoral, Otoritas Keagamaan, Aktor Gereja, Pilkada Lokal, Makassar</i> DOI: 10.63280/jpsd.v1i2.50037	ABSTRAK <i>Keterlibatan aktor keagamaan dalam kontestasi politik lokal sering kali memicu perdebatan mengenai netralitas institusi ibadah vs hak politik individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan keterlibatan serta pola dukungan aktor gereja dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus gereja (pendeta/gembala) dan jemaat, serta dilengkapi dengan studi dokumentasi. Analisis data dibedah melalui kacamata Neoinstitusionalisme, konsep aktor politik, dan teori otoritas keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara institusional, gereja di Kota Makassar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, pada level aktor individual (gembala, pendeta, dan fungsionaris), terdapat ruang diskresi interpersonal dan moral yang digunakan untuk menggalang persatuan politik. Fenomena ini termaterialisasi melalui pembentukan institusi informal, seperti Jaringan Doa Kota Makassar, yang secara persuasif memobilisasi dukungan kepada kandidat petahana melalui ruang-ruang diskusi di luar struktur formal gereja. Di sisi lain, kandidat petahana memanfaatkan strategi inklusif dengan merangkul komunitas minoritas Kristen melalui fasilitasi kegiatan sosial dan program kemasyarakatan. Temuan ini menegaskan bahwa netralitas institusi keagamaan bersifat semu ketika berhadapan dengan agensi aktor yang memiliki otoritas kharismatik dalam memengaruhi preferensi pemilih jemaat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur sosiologi politik mengenai dinamika political endorsement dan pemanfaatan jaringan keagamaan informal dalam demokrasi lokal.</i> Copyright © 2026 JPSD. All rights reserved.
---	---

Pendahuluan

Mengamati situasi politik yang ada tentulah muncul beberapa kompleksitas termasuk apabila mengaitkan agama dan politik. Dalam hal ini kecenderungan Aktor Gereja dan politik merupakan bentuk sikap sebagai warga negara terhadap gereja dan aktor politik ialah bisa negatif atau positif (Ming, 2021). Memilih kedua sikap tersebut tentulah dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Menurut Putra et al. (2023) sebagian orang bersikap antipati, curiga, pasif, dan manipulative ketika Gereja dikaitkan dengan politik. Mereka melihat politik itu sebagai “momok” yang menakutkan dan “kotoran” yang menjijikkan. Sehingga kelompok ini cenderung menentang semua peran Gereja dalam bidang politik (Udju dan Rohi, 2017).

Tapi adapula yang justru mengacu pada Alkitab bahwa jemaat dan umat Kristen wajib untuk menyiapkan umat dalam persiapan menentukan pemimpin, hal itu juga merupakan *responsible* (Mbaloto, 2025). Sehingga tidak heran memang ada bahasan yang cukup kompleks. Jo (2023) berpendapat bahwa secara umum gereja seharusnya tidak berpolitik praktis. Bukan karena politik itu kotor dan gereja itu suci, tetapi untuk menjaga netralitas dan kesaksian gereja yang harus menyuarakan suara kenabian bagi pihak-pihak yang terlibat politik. Tetapi dalam konteks kecenderungan aktor gereja dalam politik itu baru benar, namun perlu kehati-hatian, sebab memang dukungan aktor gereja adalah bentuk interpersonal moral yang bisa dibilang merupakan bagian dari hak warga negaran dan hak demoratis setiap individu.

Sementara itu Simamora (2018) justru berpendapat bahwa warga gereja seharusnya tidak perlu merasa “tabu” berbicara tentang politik dengan mengatakan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja. Ketika tinggal di bumi, Yesus sendiri tidak menghindar dari kegiatan politik (Mbaloto, 2025). Ia pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang pajak, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” (Mat. 22:17). “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21),

Pada dasarnya politik itu memiliki arti yang baik yaitu menata negara dengan sebuah sistem yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiardjo (2007) yang mengatakan bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sehingga analisa sederhannya, ketika politik punya tujuan yang baik dalam menata, sehingga tidaklah salah ketika ada kecenderungan aktor gereja sebagai warga negara yang baik menunjukkan dukungannya pada pesta demokrasi.

Dalam perjalanan sejarah, silih berganti para apologet dan para teolog Kristen, berusaha untuk mencari hubungan yang relevan antara gereja dan negara, dan kegiatan berpolitik sebagai tanggung jawab warga gereja selaku warga negara. Belakangan kebanyakan dari mereka ber-pendapat bahwa gereja harus dipisahkan dari negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja, sebaliknya gereja patut memberikan sumbangsih sebagai perwujudan dari “menjadi garam dan terang dunia”.

Pada pemilihan presiden 2014 – 2019, PGPI (Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia) mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Pdt. Jacob Nahuway dimana isinya adalah mendukung Gerindra dan Prabowo untuk menjadi RI-1 lima tahun kedepan. Beliau pun mengeluarkan surat

edaran ke seluruh gereja di bawah PGPI di Indonesia, yang jumlahnya kira-kira 12 juta jiwa. Beliau menyatakan dukungannya pada Gerindra dan Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan dengan argument bahwa Presiden harus berlatar belakang militr/TNI, agar Indonesia tidak kacaun balau (Ming,2021).

Hubungan antara agama dan politik memang perlu dijaga dengan hati-hati. Ketika agama terlibat dalam ranah politik, ada risiko konflik kepentingan, intoleransi, atau bahkan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik tertentu (Pradana et al., 2022). Sebaliknya, politik yang terlalu mengintervensi urusan keagamaan dapat mengancam kebebasan beragama dan memicu konflik sosial. Penting untuk memahami batasan dan menjaga keseimbangan antara kedua bidang ini demi mewujudkan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Studi Bataona dan Bajari (2017) tentang Gereja di Nusa Tenggara Timur juga menyebutkan bahwa dalam dua kali Pemilihan Gubernur di Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wali Kota Kupang, keterlibatan Gereja terutama otoritas Gereja Katolik sangat nyata dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat tertentu. Temuan Bataona dan Bajari didukung oleh testimoni beberapa pihak bahwa dalam pemilihan kepada daerah di banyak kabupaten di Nusa Tenggara Timur, otoritas Gereja juga berpolitik praktis.

Selanjutnya studi Bakar & Wahyu (2022) mengenai gereja dan partisipasi politik juga menyebutkan kehadiran salah seorang calon Gubernur Sulawesi Selatan pada perayaan Natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Makassar tahun 2018. Kehadiran kandidat gubernur saat itu disambut hangat oleh jemaat Gereja HKBP yang menandakan bahwa Gereja tidak menutup diri dari politik.

Pada kasus yang lain, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar melalui kanal Youtube Komkep Kams Official yang diikuti sekitar 1.300-an subscribers melakukan sosialisasi politik yang mengajak pemuda dan masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Komisi Kepemudaan Kuskupan Agung Makassar menggunakan hastag #OMKAntiGoput yang menandakan bahwa mereka mendorong agar masyarakat tidak “golput” pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Gereja sebagai situs keagamaan memang sejatinya dan seharusnya tidak berpolitik akan tetapi peneliti ingin menggambarkan bagaimana kecenderungan aktor gereja berperan dalam mendukung Danny Pomanto pada pilwakot Makassar 2020. Berdasarkan objek penelitian di Kota Makassar, terlihat jumlah penduduk Kota Makassar sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk Kota Makassar
Beragama Kristen dan Katolik (2020)**

Jumlah Penduduk Kota Makassar 1.423.877	Jumlah Penduduk Menurut Agama	
	Kristen	Katolik
	114,631	47,376
Jumlah	162.007	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama Kristen dan Katolik, Mengindikasikan bahwa apakah ada kecenderungan keterlibatan aktor gereja dalam mendukung Danny Pomanto pada pemilihan walikota 2020. Apalagi pada periode pertama sebelum 2020, artikel menunjukkan keaktifan Danny Poamnto sebagai Walikota yang juga cenderung memiliki hubungan yang baik dengan gereja, kelompok keagamaan, dan beberapa jaringan umat Kristen. Selain itu, data BPS menunjukkan bahwa di Kota Makassar umat kristiani banyak ditemukan untuk wilayah kecamatan Makassar, dan kecamatan Panakkukang, dan terbilang cukup erat tatas sebuah ikatan jaringan dan komunitas mereka sebagai umat Kristen.

Terlepas dari data tersebut, kenapa harus Danny Pomanto? Karena Beliau merupakan walikota yang incumbent dan berhasil memenangkan pilwali makassar selama dua periode. Bahkan sejak periode pertama beliau sudah sering memunculkan diri untuk berupaya membentuk program yang all in one dan berusaha meng-engage semua kalangan dan kelompok. Oleh sebab itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian “bagaimana dinamika keterlibatan aktor Gereja dalam pemilihan Walikota Makassar Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020”?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aktor dalam gereja ini cenderung menunjukkan dukungannya terhadap pemenang kandidat walikota Danny Pomanto di Makassar pada tahun 2020.

Kajian Literatur

Institusionalisme Baru (New Institutionalism)

Pendekatan Institusionalisme Baru (New Institutionalism) berbeda dengan pendekatan perilaku (behavioralism) konvensional. Pendekatan ini tidak sekadar melihat politik sebagai interaksi antar-individu yang bebas, melainkan sebagai sebuah visi teoretis multisubdisipliner yang mencakup bidang sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik (Budiardjo, 2007). Dalam ranah ilmu politik, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi politik—seperti aturan formal, prosedur, serta norma dan nilai informal—memengaruhi, membatasi, dan membentuk perilaku serta hasil akhir politik (Budiardjo, 2007).

Secara konseptual, Jan-Erik Lane dan Svante Ersson mendefinisikan institusi sebagai organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Institusi mencakup lima dimensi fundamental: struktur

fisik, struktur demografis, perkembangan historis, jaringan pribadi, dan struktur sementara (keputusan-keputusan aktual). Sebagai aturan yang stabil, institusi memungkinkan para aktor yang sebenarnya mementingkan diri sendiri (self-interest) untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Institusi secara aktif menentukan siapa aktor yang sah, jumlah aktor, serta siapa yang memegang otoritas tindakan.

Inti pemikiran Institusionalisme Baru dirumuskan secara komprehensif oleh Robert E. Goodin (1996) melalui beberapa tesis utama:

- Aktor dan kelompok melaksanakan kepentingannya dalam konteks yang dibatasi secara kolektif oleh institusi.
- Pembatasan tersebut berupa pola norma, pola peran, serta perilaku dari para pemegang peran sosial yang mengalami perubahan terus-menerus.
- Pembatasan ini di sisi lain memberikan keuntungan strategis bagi aktor dalam mengejar proyek mereka.
- Faktor pembatas tersebut turut membentuk preferensi dan motivasi internal para aktor.
- Institusi memiliki akar historis yang kuat sebagai peninggalan dari tindakan masa lalu.
- Institusi memelihara serta memberi peluang dan distribusi kekuatan yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok (Goodin, 1996).

Inti pemikiran Institusionalisme Baru dirumuskan secara komprehensif oleh Robert E. Goodin (1996) melalui beberapa tesis utama:

- Aktor dan kelompok melaksanakan kepentingannya dalam konteks yang dibatasi secara kolektif oleh institusi.
- Pembatasan tersebut berupa pola norma, pola peran, serta perilaku dari para pemegang peran sosial yang mengalami perubahan terus-menerus.
- Pembatasan ini di sisi lain memberikan keuntungan strategis bagi aktor dalam mengejar proyek mereka.
- Faktor pembatas tersebut turut membentuk preferensi dan motivasi internal para aktor.
- Institusi memiliki akar historis yang kuat sebagai peninggalan dari tindakan masa lalu.
- Institusi memelihara serta memberi peluang dan distribusi kekuatan yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok (Goodin, 1996).

Bagi penganut pendekatan ini, tantangan utamanya adalah bagaimana menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Proses mengubah institusi yang ada agar menjadi lebih demokratis dapat diwujudkan melalui rekayasa institusional berdasarkan suatu rancangan institusional, yaitu penciptaan rencana aksi untuk meraih hasil bernilai dalam konteks tertentu (Goodin, 1996).

Dalam fokus studi mengenai keterlibatan aktor keagamaan, Institusionalisme Baru memberikan perspektif teoritis yang tajam untuk membedah peran Gereja sebagai institusi politik. Pertama, Gereja dipandang sebagai aktor politik kolektif yang memiliki otoritas moral dan sosial otonom, yang mampu membentuk persepsi publik serta memengaruhi arah perilaku memilih (voting behavior) jemaat. Kedua, norma, etika, dan nilai-nilai dogmatis yang dianut oleh Gereja diakui sebagai faktor penentu yang mewarnai preferensi politik serta memengaruhi perumusan kebijakan publik. Ketiga, Gereja dapat bertindak sebagai ruang artikulasi kepentingan dan advokasi sosial bagi kelompok minoritas melalui partisipasi dalam dialog politik lokal.

Melalui lensa Institusionalisme Baru, analisis terhadap kecenderungan keterlibatan aktor Gereja dalam mendukung Danny Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 tidak lagi dilihat sebagai tindakan personal yang terisolasi. Fenomena tersebut dipahami sebagai hasil interaksi strategis antara struktur institusi gereja (melalui peran Pendeta, Majelis, dan Jaringan Doa) dengan dinamika aturan pemilu serta strategi akomodasi politik calon kepala daerah, yang bergerak melampaui aturan formal demi mengamankan kepentingan kolektif umat.

Konseptualisasi Relasi Agama-Politik dan Tanggung Jawab Etis Kristen

Hubungan antara agama dan politik merupakan salah satu perdebatan paling klasik dan dinamis dalam ranah ilmu politik yang tidak bersifat dikotomis, melainkan simbiotik dan saling memengaruhi (Pradana, 2022; Simamora, 2018). Di dalam ruang pluralisme Indonesia, agama tidak sekadar menjadi sistem keyakinan transenden yang bersifat privat, melainkan juga berfungsi sebagai penyedia nilai, moralitas, dan instrumen legitimasi sosial yang kuat bagi struktur politik kekuasaan (Putra et al., 2023). Sebaliknya, aktor politik kerap menggunakan sentimen atau kedekatan keagamaan guna meraup basis massa yang loyal (Cahyani, 2024). Tarik-menarik kepentingan ini memperlihatkan bahwa ruang rumah ibadah atau institusi keagamaan sering kali menjadi medan persinggungan politik praktis yang halus dan tersirat, di mana batas-batas netralitas institusi diuji oleh realitas hak politik individu di dalamnya (Bakar dan Wahyu, 2022).

Persinggungan antara nilai transenden dan realitas kekuasaan ini secara spesifik diatur dalam dimensi etika politik Kristen (Setiawan & Panjaitan, 2021). Etika politik Kristen memandang bahwa politik bukanlah sesuatu yang kotor atau tabu yang harus dihindari oleh umat beriman, melainkan bagian dari mandat ilahi bagi manusia untuk terlibat aktif dalam mengusahakan kesejahteraan bersama atau

bonum commune (Moltmann, 1984). Teologi Kristen tidak boleh menutup mata terhadap realitas politik, ketidakadilan sosial, maupun dinamika pemilihan lokal, sehingga gereja secara etis wajib mengedukasi warganya agar menjadi "garam dan terang dunia" yang berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Moltmann, 1984).

Secara biblikal, prinsip dasar pemisahan sekaligus keterikatan tugas etis ini merujuk pada teks Alkitab dalam Matius 22:21, yang menyatakan "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah" (Cahyani, 2024). Teks ini menegaskan adanya kewajiban ganda umat Kristen yaitu tunduk pada hukum moral ketuhanan sekaligus loyal berpartisipasi dalam menata negara secara demokratis (Mbaloto, 2025, Ming, 2021). Oleh karena itu, ketika agama dan politik berinteraksi dalam bingkai etika Kristen, keterlibatan aktor gereja dalam politik lokal umumnya dibungkus dalam narasi moral universal untuk mencari sosok pemimpin yang jujur, adil, berintegritas, serta mampu melindungi hak-hak minoritas (Cahyani, 2024; Putra et al., 2023).

Dalam konteks Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, penggabungan antara nilai agama, etika politik Kristen, dan realitas politik praktis ini termanifestasi melalui orientasi dukungan para aktor gereja. Ketika institusi gereja secara hukum formal dilarang menjadi wadah kampanye, etika politik Kristen mendorong para aktornya—seperti pendeta dan majelis—untuk menggunakan hak sasi dan tanggung jawab moral mereka dalam mengarahkan jemaat secara interpersonal (Putra et al., 2023). Mereka cenderung memberikan sinyal dukungan moral tersirat kepada calon pemimpin seperti Danny Pomanto, yang dinilai mampu mengakomodasi kepentingan kolektif umat dan menjamin keadilan sosial bagi kelompok minoritas (Cahyani, 2024). Dengan demikian, relasi agama dan politik yang dipandu oleh etika politik Kristen tidak lagi sekadar menjadi dogma teologis yang pasif. Namun mengalami transformasi menjadi kesadaran politik praktis yang memengaruhi preferensi dan perilaku memilih (voting behavior) jemaat di tingkat akar rumput demi mewujudkan tatanan sosial yang inklusif (Bakar dan Wahyu, 2022; Batona dan Bajari, 2017).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk membedah secara mendalam fenomena kecenderungan keterlibatan aktor gereja pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di Kota Makassar, dengan fokus pada beberapa wilayah basis jemaat kristen seperti Kecamatan Makassar dan Panakkukang yang menjadi lokus interaksi politik intensif selama kontestasi berlangsung.

Data penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang terstruktur bersama para informan kunci, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling guna menjamin kapasitas dan otentisitas informasi. Para informan tersebut representatif terhadap tipologi aktor gereja, meliputi pendeta, majelis atau pengurus harian gereja, perwakilan jemaat akar rumput, serta perwakilan dari Jaringan Doa Kota yang aktif selama masa pemilihan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa regulasi pemilu, artikel jurnal ilmiah terdahulu, dokumen skripsi terkait, serta pemberitaan media massa tepercaya mengenai strategi komunikasi politik petahana.

Proses pengumpulan data di lapangan dipandu oleh instrumen penelitian berupa pedoman wawancara (interview guide) serta alat perekam digital. Setelah seluruh data terkumpul, teknik analisis data dilakukan mengikuti model interaktif yang meliputi tiga tahapan simultan: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara ditranskripsikan dan dipilah untuk membuang informasi yang tidak relevan dengan fokus keterlibatan aktor.

Selanjutnya, data disajikan secara naratif-deskriptif dan dikontekstualisasikan dengan pisau analisis teori Institusionalisme Baru guna melihat bagaimana norma informal gereja bersinggungan dengan strategi politik calon. Tahap akhir adalah verifikasi, di mana keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik bersifat valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil & Diskusi

Konteks Sosio-Politik Wilayah Studi

Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar tahun 2020 berlangsung dalam konvensi politik yang sangat dinamis dan kompetitif, terlebih karena diselenggarakan di tengah situasi pandemi global COVID-19 yang membatasi ruang gerak kampanye konvensional. Kontestasi ini menjadi ruang pertarungan elektoral yang sengit bagi empat pasangan calon, di mana Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto hadir sebagai figur petahana (incumbent) yang memiliki basis massa riil dan investasi sosial yang kuat dari periode kepemimpinan sebelumnya. Lanskap geopolitik Kota Makassar secara historis dikenal memiliki karakter pemilih yang plural, kosmopolit, namun tetap sarat dengan sentimen identitas sosiologis yang mencakup aspek etnisitas dan religiositas. Dalam peta persaingan yang ketat tersebut, setiap pasangan calon dituntut untuk tidak hanya mengandalkan mesin partai politik, melainkan juga melakukan penetrasi strategis ke dalam ceruk-ceruk pemilih sektoral, termasuk kelompok masyarakat minoritas.

Dalam konseptualisasi peta geopolitik lokal Makassar, komunitas Kristen menempati posisi demografis yang strategis sebagai salah satu segmentasi pemilih yang signifikan. Karakteristik demografis masyarakat Kristen di Kota Makassar terkonsentrasi secara padat di beberapa wilayah urban tertentu, dengan basis utama berada di Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Wilayah-wilayah ini secara sosiologis mencerminkan kantong-kantong pemilih yang memiliki tingkat kohesi sosial yang tinggi, di mana aktivitas kemasyarakatan mereka berpusat dan terinstitusionalisasi di sekitar lingkungan gereja lokal. Struktur demografis yang mengelompok ini secara otomatis membentuk ruang geografis selektif yang menarik perhatian para aktor politik eksternal untuk melakukan mobilisasi suara secara persuasif dan terukur.

Keberadaan basis jemaat yang terkonsentrasi di Kecamatan Makassar dan Panakkukang ini menciptakan lanskap awal yang mempertemukan kepentingan aktor gereja dengan para kandidat kepala daerah. Bagi pendukung kandidat petahana Danny Pomanto, wilayah-wilayah basis ini bukan sekadar angka dalam daftar pemilih tetap, melainkan ruang interaksi kultural di mana pendekatan inklusif harus diartikulasikan untuk mereduksi potensi polarisasi berbasis agama. Sebaliknya, bagi masyarakat Kristen di wilayah tersebut, momentum Pilwalkot 2020 dipandang melalui kacamata perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak sipil keagamaan mereka di tengah mayoritas. Interaksi sosio-politik yang terbangun di kedua kecamatan ini pada akhirnya tidak lagi berjalan searah, melainkan bertransformasi menjadi panggung negosiasi nilai dan kepentingan kolektif yang melibatkan otoritas moral para aktor gereja guna menentukan arah kebijakan lokal di masa depan.

Tipologi dan Peran Institusional Aktor Gereja dalam Pemilu

Memahami keterlibatan komunitas keagamaan dalam kontestasi politik memerlukan pemetaan yang jelas mengenai struktur sosiologis di dalam institusi itu sendiri. Institusi gereja tidak boleh dipandang sebagai entitas tunggal yang monolitik, melainkan sebuah ruang yang di dalamnya terdapat stratifikasi aktor dengan derajat otoritas, pengaruh, dan peran yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil data lapangan di wilayah Kecamatan Makassar dan Panakkukang, aktor-aktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi utama: pimpinan yayasan/sinode, pendeta, majelis atau pengurus harian gereja, jemaat pada level akar rumput, serta Jaringan Doa Kota yang bergerak secara lintas institusional. Masing-masing kelompok aktor ini memiliki cara pandang yang dinamis dalam mempersepsikan politik lokal, khususnya pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020.

Dalam perspektif New Institutionalism (Institusionalisme Baru), institusi tidak hanya dibentuk oleh hukum-hukum formal yang tertulis, melainkan juga dihidupkan oleh aturan informal (informal rules), kebiasaan, dan norma-norma kolektif yang disepakati bersama. Secara formal, aturan hukum pemilu di Indonesia

secara tegas melarang segala bentuk aktivitas politik praktis dan kampanye di dalam rumah ibadah. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembatasan formal ini tidak serta-merta mematikan peran politik gereja. Sebaliknya, institusi gereja memanfaatkan fungsi otonomnya sebagai ruang edukasi moral dan etika untuk membentuk kesadaran politik jemaat tanpa harus menabrak rambu-rambu hukum formal tersebut.

Otoritas moral tertinggi dalam struktur ini berada di tangan pendeta. Sebagai tokoh karismatik yang mengemban tanggung jawab pelayanan mimbar, pendeta mempersepsikan politik sebagai bagian dari tanggung jawab iman untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Meskipun pendeta menjaga netralitas mimbar resmi dari ajakan memilih figur tertentu, ruang-ruang informal di luar jam ibadah dimanfaatkan untuk memberikan kriteria normatif mengenai calon pemimpin. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pendeta di Kecamatan Panakkukang:

"Memang gereja tidak boleh berpolitik praktis, tapi maksudnya orang-orang yang ada di dalamnya tentu harus terlibat dalam hak pilih memilih, hal ini membuktikan bahwa memang gereja juga berintelktual dalam politik. Jadi, tidak salah kalau dikatakan bahwa gereja memang tidak berpolitik tapi gereja harus menyiapkan orangnya yang akan memimpinnya."

Di tingkat berikutnya, majelis atau pengurus harian gereja bertindak sebagai elit administratif yang menjembatani urusan organisasi dengan jemaat. Pengurus gereja sering kali mempersepsikan politik sebagai instrumen strategis untuk mengamankan kepentingan logistik dan legalitas institusi. Berbeda dengan pendeta yang bergerak di ranah moral-teologis, majelis lebih terbuka dalam berinteraksi dengan tim sukses kandidat guna memastikan bahwa kebutuhan komunitas mereka terakomodasi. Sementara itu, dinamika yang paling cair ditemukan pada diskusi Jaringan Doa. Kelompok ini didominasi jemaah pendukung Calon walikota Makassar yaitu Danny Pomanto, dengan alasan hubungan kekeluargaan, keakraban, pola komunikasi dan engagement. Beberapa tokoh berpendapat bahwa Danny memiliki kejujuran dan intelektualnya yang kuat sehingga memainkan peran atas dasar kesadaran pribadi setiap aktor dalam jaringan doa untuk mendukung beliau dalam pesta demokrasi Kota Makassar 2020 silam. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan pendeta yang berpendapat bahwa:

"Saya cenderung mendukung Danny Pomanto karena ada hubungan yang baik antara dia dan gereja sejak awal. Namun demikian, sebagai seorang akademisi, saya menyadari bahwa gereja seharusnya tidak secara langsung mendukung politik. Meskipun begitu, gereja memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan umatnya, dengan mengutip ayat Alkitab Yesaya 33:22 yang menyatakan bahwa Tuhan adalah hakim, pemberi hukum, dan raja. Ini bisa diinterpretasikan mirip dengan prinsip trias politica."

Pada level akar rumput, jemaat mempersepsikan politik lokal melalui kacamata rasa aman dan jaminan kebebasan beragama. Melalui interaksi berlapis dari pendeta, majelis, dan pengaruh Jaringan Doa, preferensi politik jemaat dikonstruksikan. Norma informal yang menekankan pentingnya persatuan kelompok minoritas dan perlunya mendukung pemimpin yang inklusif secara perlahan membentuk motivasi internal jemaat. Melalui mekanisme interaksi institusional yang halus inilah, preferensi kolektif umat berhasil dihimpun, yang pada akhirnya memantapkan perilaku memilih (voting behavior) jemaat untuk cenderung berorientasi pada figur petahana yang dinilai paling akomodatif terhadap eksistensi mereka.

Pola Komunikasi dan Strategi Pendekatan Danny Pomanto terhadap Komunitas Kristen.

Keberhasilan Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto dalam mempertahankan dan memperkuat basis elektoralnya di kalangan komunitas Kristen pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 tidak dapat dipisahkan dari efektivitas pola komunikasi politik yang digunakannya. Sebagai seorang petahana (incumbent), Danny Pomanto menerapkan strategi engagement atau pendekatan yang sangat terstruktur, yang mengombinasikan saluran komunikasi kultural, pendekatan personal, dan pembuktian melalui akomodasi kebijakan yang inklusif. Dalam perspektif sosiologi politik, pola pendekatan ini memperlihatkan bagaimana seorang aktor politik secara strategis mampu membaca dan memanfaatkan struktur sosial keagamaan yang ada sebagai instrumen sosialisasi politik yang persuasif tanpa harus mencederai batasan-batasan hukum formal di tempat ibadah.

Salah satu pilar utama dari strategi komunikasi Danny Pomanto adalah pengutamaan pendekatan kultural dan personal yang dilakukan di luar ruang mimbar resmi gereja. Sadar bahwa aturan formal pemilu melarang aktivitas kampanye di dalam gedung gereja, Danny Pomanto mengalihkan ruang interaksinya ke ranah-ranah informal dan semi-formal yang melibatkan komunitas Kristen secara emosional. Pola ini dilakukan dengan cara menghadiri undangan perayaan hari besar keagamaan yang diadakan di aula umum, menghadiri pertemuan persekutuan doa lintas jemaat, hingga melakukan audiensi personal dengan para pimpinan sinode dan pendeta senior. Pendekatan tatap muka (face-to-face communication) yang hangat dan setara ini berhasil mengikis jarak birokratis antara kepala daerah dan warga minoritas, sehingga menumbuhkan rasa kedekatan dan saling percaya (mutual trust).

Lebih dari sekadar retorika politik, pola komunikasi yang dibangun oleh Danny Pomanto diperkuat oleh bukti nyata berupa akomodasi kebijakan yang dinilai sangat inklusif dan menjawab kebutuhan riil jemaat. Di kalangan komunitas Kristen Kota Makassar, khususnya di wilayah Kecamatan Makassar dan Panakkukang, rekam jejak kebijakan Danny Pomanto pada periode pertama kepemimpinannya dipandang sebagai komitmen konkret terhadap prinsip

keadilan sosial dan kesetaraan hak warga negara. Kebijakan yang paling sering disoroti dan dirasakan langsung dampaknya oleh jemaat adalah perhatian penuh pemerintah daerah terhadap keberadaan dan kesejahteraan para penyuluh agama Kristen.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan tokoh pengurus gereja, pola pendekatan melalui akomodasi kebijakan inilah yang menjadi magnet utama penarik simpati jemaat. Seorang Informan yang juga anggota majelis gereja yang aktif dalam mengamati dinamika politik lokal di Kecamatan Makassar memberikan pemaparannya mengenai strategi pendekatan petahana tersebut:

“Banyaknya kegiatan yang ada antara aktor/jemaat gereja dengan pemerintah ini, justru puji Tuhan gereja banyak mendapatkan bantuan pemerintah kota/walikota terpilih baik dari segi pembangunan, maupun bantuan lainnya. Selain itu, pendekatan gereja terhadap calon yang dinilai unggul juga bermaksud baik untuk umat dan jemaat secara umum, coba bayangkan jika kita punya akses yang dekat dengan pemerintahan, maka sederhananya sebagai contoh Danny Pomanto menyiapkan penyuluh agama untuk dijadikan guru ASN pengajar Umat Kristiani, sehingga tidak lagi kita mendengar ada istilah bahwa siswa kristiani diajar guru Islam. Hal-hal seperti itulah yang sudah ada sejak periode pertama dan menjadi dukungan besar Danny Pomanto bagi gereja dan Umat kristiani”.

Secara keseluruhan, ungkapan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah kota atau walikota terpilih memberikan dukungan yang signifikan bagi gereja dan umat Kristen. Ini mencerminkan dinamika dan strategi dalam membangun hubungan antara kelompok dan aktor agama dan politik, di mana kecenderungan aktor dan komunitas ataupun kelompok agama memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kebijakan dan tindakan pemerintah, dan sebaliknya.

Selain itu, Danny Pomanto selama menjabat memiliki komitmen dalam menjaga hubungan baik dengan para aktor dan pemimpin Kristen Kota Makassar dengan memberikan bantuan dalam setiap kegiatan Gereja. Hal ini dibenarkan oleh Informan Pendeta yang menyatakan bahwa:

“Strategi Danny Pomanto juga efektif, seperti mengumpulkan jemaat untuk bersosialisasi di luar gereja. Beliau patuh aturan dan bisa mempersatukan umat Kristen dalam berbagai acara sosialisasi. Program-programnya pada pemilihan 2020, seperti program kebersihan, persatuan, dan merangkul kelompok agama, terlihat positif. Dukungan dari jemaat dan pendeta pun kuat. Selain itu, Selama periode pertama, beliau menunjukkan pandangan luar biasa dan pemikiran terbuka dengan menyediakan rumahnya dan sumbangan untuk acara Natal. Ini menunjukkan persaudaraan yang kuat dan mendukung Strategi Danny Pomanto yang luar biasa, terutama terhadap gereja. Meskipun bantuannya tidak selalu berupa materi karena risiko, namun beliau tetap memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, makanan, tenda dll.”

Data ini menunjukkan strategi efektif yang dilakukan Danny Pomanto dalam memenangkan dukungan dari jemaat dan pendeta Kristen, serta dalam mempersatukan umat Kristen melalui berbagai acara sosialisasi di luar gereja. Program-programnya pada pemilihan 2020, seperti kebersihan, persatuan, dan merangkul kelompok agama, dinilai positif oleh masyarakat. Danny Pomanto juga menunjukkan pandangan yang terbuka dengan menyediakan rumahnya dan sumbangan untuk acara Natal, yang menunjukkan persaudaraan yang kuat dengan gereja. Meskipun bantuan yang diberikannya tidak selalu berupa materi karena risiko, dia tetap memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, makanan, tenda, dan sumbangan lain.

Dialektika Etika Politik Kristen dan Kecenderungan Arah Dukungan

Kecenderungan keterlibatan serta arah dukungan para aktor gereja dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk oportunisme politik atau transaksi elektoral pragmatis. Di balik pilihan-pilihan politik yang diambil oleh para pendeta, majelis, dan pengurus komunitas keagamaan, terdapat sebuah pertimbangan teologis yang mendalam yang bersumber pada Etika Politik Kristen. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa motif utama yang menggerakkan para aktor gereja di Kecamatan Makassar dan Panakkukang untuk memberikan sinyal dukungan moral tersirat kepada Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto adalah adanya titik temu antara rekam jejak sang kandidat dengan nilai-nilai normatif-etis yang diajarkan dalam teologi Kristen mengenai keadilan sosial dan perlindungan kelompok minoritas.

Dalam diskursus Etika Politik Kristen, politik pada hakikatnya dipandang sebagai instrumen etis untuk mengusahakan kesejahteraan bersama yang inklusif atau dikenal dengan istilah *bonum commune* (Moltmann, 1984). Pemikiran teologis ini menegaskan bahwa gereja dan para pemimpinnya tidak boleh bersikap apatis atau menarik diri dari realitas sosial-politik di sekitarnya. Sebaliknya, gereja memiliki tanggung jawab profetik untuk memastikan bahwa kekuasaan politik yang ada digunakan untuk menegakkan keadilan, merawat keberagaman, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, termasuk kaum minoritas yang sering kali rentan secara posisi sosiologis. Ketika dihadapkan pada momentum Pilwalkot Makassar 2020, tanggung jawab moral untuk mewujudkan *bonum commune* inilah yang memotivasi para hamba Tuhan dan pengurus gereja untuk secara aktif mengkaji kualitas personal dan komitmen para calon pemimpin.

Secara biblikal, landasan etis keterlibatan ini sering kali bersandar pada dialektika teks Matius 22:21, yang menginstruksikan umat untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah (Mbaloto, 2025). Prinsip ini tidak diartikan sebagai pemisahan mutlak yang membuat umat Kristen menjadi pasif terhadap urusan negara, melainkan sebagai panggilan untuk menjalankan kewajiban ganda warga negara secara bertanggung jawab. Memberikan hak kepada "Kaisar" berarti ikut serta dalam menata kehidupan

publik melalui partisipasi demokratis yang cerdas dan berintegritas. Bagi para aktor gereja di Makassar, kewajiban etis ini diwujudkan dengan tidak membiarkan jemaat berjalan tanpa arah di tengah arus kampanye yang penuh dengan janji. Elit gereja merasa wajib memberikan panduan kriteria moral agar hak pilih jemaat dapat disalurkan kepada figur yang benar-benar membawa kemaslahatan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan salah seorang tokoh Gereja memperlihatkan bagaimana penalaran etis-teologis ini melandasi arah dukungan mereka di lapangan:

"Oleh karena itu, gereja harus memberikan pendidikan kepada umatnya agar mereka dapat berpartisipasi dalam politik dengan baik dan demi kesejahteraan. Tujuan orang Kristen yang antusias terhadap politik adalah untuk menjadi contoh yang baik dan memberikan pencerahan kepada yang lain, sebagaimana ditunjukkan dalam perannya sebagai "garam dan terang" dalam masyarakat"

Wawancara tersebut mengonfirmasi bahwa diskursus moral mengenai keadilan dan kesetaraan hak menjadi pendorong utama munculnya dukungan interpersonal-moral dari para elit gereja. Karena aturan formal melarang penggunaan mimbar suci untuk berkampanye, para aktor gereja mematuhi batasan tersebut namun tetap menyalurkan tanggung jawab etis mereka di ruang-ruang informal. Melalui sinyal-sinyal dukungan yang halus, pengingat dalam persekutuan doa kecil, serta diskusi keluarga, para pendeta dan majelis berhasil mentransmisikan nilai-nilai pilihan mereka kepada jemaat di tingkat akar rumput. Dialektika antara kewajiban iman dan tanggung jawab warga negara ini pada akhirnya mengkristal menjadi sebuah kesadaran kolektif yang memantapkan orientasi memilih jemaat Kristen di Kota Makassar untuk memenangkan pasangan petahana dalam pemilu daerah 2020.

Kesimpulan

Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme baru, studi menemukan peran gereja sebagai institusi tidak terlibat secara langsung dalam proses politik lokal. Namun aktor dalam gereja, seperti gembala, pendeta, dan jemaat memang secara moral, interpersonal dan tersirat dipandang boleh saja untuk membentuk persatuan dan kelompok persatuan seperti kelompok diskusi untuk menentukan pemimpinnya. Salah satu contoh adalah komunitas jaringan doa Kota Makassar yang memberikan kecenderungannya dalam keterlibatan mereka secara persuasif mendukung calon yang dinilai unggul dalam hal ini Danny Pomanto.

Konteks ini dilakukan dengan tetap menjaga etika politik Kristen untuk mengetahui batasan mana hubungan yang bisa dan tidak bisa, termasuk tidak melibatkan gereja secara institusi pada politik praktis, tetapi dilakukan secara interpersonal dan moral dalam meluangkan haknya pada pesta demokrasi. Adanya kegiatan diskusi oleh Jaringan doa Pada Acara Diskusi Calon Walikota yang dihadiri oleh banyak petinggi gereja, gembala, dan pengikutnya menunjukkan

bahwa kecenderungan keterlibatan aktor gereja dalam aktivitas politik moral dan tersirat didukung oleh tokoh-tokoh penting dalam hierarki gereja, yang bisa saja memiliki pengaruh besar dalam lingkup eksternal gereja pada jemaat mereka. prinsip agama dengan prinsip politik dalam konteks Alkitab, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang relevansi nilai-nilai agama dalam ranah politik.

Dengan merujuk pada ayat Alkitab, penulis mencoba memahami peran gereja dalam konteks modern politik, menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran politik dalam masyarakat. Sehingga, Hal ini membuktikan memang ada kecenderungan dukungan di luar gereja sebagaimana aktor gereja bergerak atas arahan alkitab yang mewajibkan untuk bersatu dan menyiapkan pemimpin, maka tidak heran dan lazim ketika persatuan dan komunitas atau kelompok agama secara moral dan interpersonal melakukan kegiatan diskusi dan persuasive dalam menentukan pemimpinnya.

Studi ini mengindikasikan adanya kecenderungan dan upaya strategi yang efektif dari Danny dalam upaya memenangkan dukungan dari jemaat dan pendeta Kristen. Selain itu, Danny Pomanto juga terlibat dalam mempersatukan umat Kristen melalui berbagai acara sosialisasi di luar gereja. Program-programnya pada periode pertama dan pemilihan 2020, seperti kebersihan, persatuan, dan merangkul kelompok agama, dinilai positif oleh masyarakat gereja. Danny Pomanto juga menunjukkan pandangan yang terbuka dengan menyediakan rumahnya dan sumbangan untuk acara Natal, yang menunjukkan persaudaraan yang kuat dengan gereja.

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa gagasan mengenai netralitas mutlak institusi keagamaan pada dasarnya bersifat semu ketika dihadapkan pada bertemunya kepentingan proteksi sosial kelompok minoritas dengan agensi aktor karismatik. Melalui rekayasa institusional yang halus (*institutional engineering*) dan pola komunikasi informal, para tokoh agama berhasil mengonstruksikan preferensi kolektif umat dan memantapkan perilaku memilih (*voting behavior*) jemaat Kristen di Makassar. Studi ini pada akhirnya memberikan kontribusi penting bagi literatur sosiologi politik bahwa jaringan keagamaan informal dan *political endorsement* tersirat dari elit agama tetap menjadi instrumen mobilisasi elektoral yang sangat determinan dalam dinamika demokrasi lokal.

References

- Adolf, B.S. (2018). Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik di Indonesia, *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 2(1)
- Bakar, A., & Wahyu, M. (2022). Gereja dan partisipasi politik. *Vox Populi*, 5(1), 61–69. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29646>
- Bataona, M. R., & Bajari, A. (2017). Relasi kuasa dan simbol-simbol ekonomi-politik gereja dalam kontestasi politik lokal Provinsi NTT. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 121–135.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Goodin, R. E. (1996). *The theory of institutional design*. Cambridge University Press.
- Jo, H. (2022). Bolehkah gereja berpolitik? Rubrik Kristen. <https://rubrikkristen.com/bolehkah-gereja-berpolitik/> (Catatan: Di dalam teks Anda menulis tahun sitasi 2023, namun di draf referensi asli tertulis tahun terbit 2022).
- Mbaloto, P. C. (2025). Manifestasi sikap politik Yesus di Jemaat Imanuel Taripa. *Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 8(1), 38–57.
- Ming, D. (2021). Peranan gereja dalam sistem pemerintahan yang baik di Indonesia. *Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 87–103.
- Moltmann, J. (1984). *On human dignity: Political theology and ethics*. Fortress Press.
- Pradana, M. Y. A., Parasmana, M., Fajrin, H., & Fadilah, M. F. (2022). Politisasi agama dalam ranah konflik di Indonesia (Sebuah tinjauan kritis). *Sosioreligius*, 7(1), 68–82.
- Putra, A., Sahari, G., Manu, C. B. S., & Berek, F. (2023). Memahami secara teologis politik dalam gereja. *Saint Paul's Review*, 3(1), 78–92.
- Setiawan, D. E. & Panjaitan, F. (2021). Titik Temu Pancasila Dan Etika Politik Gereja Dalam Melawan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi* 7(01):43–56.
- Simamora, A. B. (2018). Politik menurut Alkitab dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 2(1).
- Udju, Y. & Pendahuluan, P. (2017). Misi Gereja Melalui Dunia Politik. *Jurnal Sosial*, 6(1): 33-48